

**PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM  
PELAKSANAAN PILKADES DI DESA BALEREJO  
KECAMATAN KAUMAN KABUPATEN TULUNGAGUNG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

Luis Ardianta  
NPP.31.0548

*Asdaf Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur  
Program Studi Politik Indonesia Terapan  
Email: luardianta17@gmail.com*

Pembimbing Skripsi: Drs. Maichel Wutoy, M.M.

**ABSTRACT**

**Problem (GAP):** *The author focuses on political participation in the village head election (Pilkades) in Balerejo Village showing a strong commitment to maintaining the level of voter participation through effective strategies.* **Objective:** *The aim of this research is to create an inclusive and participatory government system, where the voice of every citizen is respected in every decision taken.* **Method:** *this research uses a descriptive quantitative method with an inductive approach with data collection techniques using observation, documentation and interview methods as well as data analysis techniques using interactive model data analysis and using the theory of political participation according to Arnstein. Data collection techniques were carried out using in-depth interviews (13 informants) and documentation.* **Results/Findings:** *The findings obtained by the author in this research prove that community political participation in the implementation of the Balirejo Village Village Election shows a very satisfactory level of participation, as seen from active community involvement during the Village Election process, as well as various forms of participation such as discussions and social media.* **Conclusion:** *Community political participation in the implementation of the Balerjo Village Village Election shows a very satisfactory level. The community was actively involved in various stages of the village election process, showing high enthusiasm in choosing their village leader. During the registration and candidate determination stages, the community took part in socialization and village meetings related to the Village Head Election, as well as attending campaign events to hear the vision and mission of each village head candidate.*

**Keywords:** *Political Participation, Village Head Election, Community*

**ABSTRAK**

**Permasalahan (GAP):** *Penulis berfokus pada partisipasi politik dalam pemilihan kepala desa (Pilkades) di Desa Balerejo menunjukkan komitmen yang kuat dalam menjaga tingkat partisipasi pemilih melalui strategi efektif.* **Tujuan:** *Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang inklusif dan*

partisipatif, di mana suara setiap warga dihargai dalam setiap keputusan yang diambil. **Metode:** penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan secara induktif dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, dokumentasi, dan wawancara serta teknik analisis data menggunakan analisis data model interaktif dan menggunakan teori partisipasi politik menurut Arnstein. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam (13 informan), dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu membuktikan bahwasanya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan Pilkades Desa Balirejo menunjukkan tingkat partisipasi yang sangat memuaskan, terlihat dari keterlibatan masyarakat yang aktif selama proses Pilkades, serta berbagai bentuk partisipasi seperti diskusi dan media sosial. **Kesimpulan:** Partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan Pilkades Desa Balerejo menunjukkan tingkat yang sangat memuaskan. Masyarakat secara aktif terlibat dalam berbagai tahapan proses Pilkades, menunjukkan antusiasme yang tinggi dalam menentukan pemimpin desa mereka. Selama tahap pendaftaran dan penetapan calon, masyarakat turut mengikuti sosialisasi dan rapat desa terkait Pilkades, serta hadir dalam acara kampanye untuk mendengarkan visi-misi dari setiap calon kepala desa

**Kata Kunci:** Partisipasi Politik, Pemilihan Kepala Desa, Masyarakat

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Partisipasi politik adalah salah satu elemen kunci dalam sistem demokrasi. Pada dasarnya, demokrasi dan partisipasi didasari oleh prinsip bahwa individu yang paling memahami kebutuhan dan kepentingan mereka memiliki kemampuan untuk memengaruhi kebijakan dan tindakan dalam masyarakat. Oleh karena itu, warga masyarakat berhak berperan aktif dalam menentukan agenda politik. Partisipasi politik masyarakat adalah tindakan politik yang harus dijalankan oleh semua warga negara, terutama dalam negara yang menganut sistem demokratis. Tingkat partisipasi politik, baik yang tinggi maupun rendah, mencerminkan sejauh mana kesadaran masyarakat terhadap isu-isu politik dan sejauh mana mereka ingin terlibat dalam pengambilan keputusan politik. Tingkat partisipasi ini juga mencerminkan komitmen masyarakat terhadap terciptanya tatanan demokratis dalam masyarakat (Huntington, 2004). Secara umum, partisipasi politik dapat dijelaskan sebagai tindakan individu atau kelompok dalam kegiatan politik. Miriam Budiardjo (2009), seorang ahli politik Indonesia, menyatakan bahwa partisipasi dalam proses politik (Budiardjo, 2009). Dalam sistem pemerintahan Indonesia, bagian terkecil dan tingkat paling bawah adalah pemerintahan desa (Jasmiyanti, 2021). Panitia pemilihan kepala desa memiliki peran strategis dalam semua tahapan pemilihan, mulai dari pendataan calon pemilih, penjurangan bakal calon kepala desa, pelaksanaan pemungutan suara, penghitungan suara, hingga pelaporan hasil pemilihan kepala desa (Budiono, 2000). Adapun menurut Mustadin (2014), faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya golput dalam pemilihan meliputi faktor teknis seperti sakitnya pemilih, faktor pekerjaan seperti tidak mendapatkan izin dari tempat kerja, faktor

administratif seperti tidak terdaftar sebagai pemilih dan tidak mendapatkan kartu pemilihan, serta faktor politik seperti ketidakpercayaan masyarakat terhadap partai politik dan kandidat yang maju dalam pemilu (Mustadin, 2014). Mubyarto dan Sartono Kartodirjo (1985:35) mendefinisikan partisipasi sebagai ungkapan keinginan untuk turut serta mensukseskan suatu program sesuai dengan kemampuannya tanpa mengorbankan kepentingannya, partisipasi dalam pembangunan dapat dikatakan sebagai bentuk kerjasama dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat dan pemerintah (Mubyarto, 1985). Menurut Sondang P Siagian (1983:42), idealnya unsur-unsur yang harus dipenuhi selama pelaksanaan partisipasi tersebut, misalnya mental dan emosional lebih dari sekedar keterlibatan fisik, kemauan untuk berpartisipasi dalam mencapai tujuan untuk menciptakan rasa kemauan dan tanggung jawab (Sondang, 1983). Menurut Siti Irene (2011:51) partisipasi dapat diartikan dengan setiap warga negara memiliki suara dalam pengambilan keputusan, baik itu melalui intermediasi institusi yang mewakili kepentingannya maupun secara langsung. Partisipasi seperti ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi konstruktif. Jika dihubungkan dengan otonomi daerah yang intinya merupakan wewenang ada ditangan rakyat yang tinggal di daerah yang bersangkutan, maka pemerintah daerah bisa membuka ruang bagi seluruh komponen masyarakat untuk dapat terlibat dan berperan serta dalam seluruh proses pembangunan (Irene, 2011). Partisipasi menurut pandangan Loekman Soetrisno (1995:222) merupakan kesediaan masyarakat untuk mendukung secara mutlak program-program pemerintah yang disusun dan ditentukan tujuannya oleh pemerintah. Definisi yang pertamadari pernyataan tersebut diartikan adanya subordinasi, subsistem dan supra sistem bagian yang pasif dari sistem pembangunan nasional. Para perencana dan pelaksana memakai suatu konsep hierarkis dalam menentukan proyek pembangunan yang diperlukan oleh rakyat, sedangkan proyek yang diajukan oleh rakyat dinilai sebagai keinginan, karena proyek yang dianggap sebagai kebutuhan harus dilaksanakan maka dari itu proyek yang sudah diusulkan oleh masyarakat tidak diprioritaskan lagi (Soetrisno, 1995). Dalam aktivitas pembangunan, partisipasi masyarakat dapat diartikan sebagai wujud kesadaran serta kepedulian dan tanggung jawab masyarakat akan pentingnya pembangunan yang bertujuan guna meningkatkan tatanan hidup mereka, artinya melalui partisipasi yg diberikan berarti masyarakat menyadari bahwa kegiatan pembangunan ini tidaklah hanya sekedar kewajiban yang harus dilaksanakan oleh (aparatus) pemerintah sendiri, namun juga menuntut keterlibatan warga dalam mensejahterakan hidupnya (Mardikanto, 2013).

## **1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Tingkat partisipasi politik masyarakat pada pemilihan Kepala Desa Balerejo meningkat pada tahun 2019 jika dibandingkan dengan pemilihan kepala desa pada tahun 2013 dikarenakan adanya kesadaran masyarakat dalam pemilu. Di Desa Balerejo rata-rata masyarakat sudah tahu dan mengenal calon yang akan bertarung dalam Pilkades yang dilaksanakan pertengahan bulan November tahun 2019. Di desa Pantulan terdapat 3 dusun dengan 7 rukun warga dan 16 rukun tetangga. Pada tahun 2019, warga Desa Balerejo memberikan hak suara dalam pemilihan

kepala desa. Namun, masih ditemukan daftar pemilih yang tidak menggunakan hak suaranya atau golput dalam pilkades yang diselenggarakan. Adapun menurut Mustadin (2014), faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya golput dalam pemilihan meliputi faktor teknis seperti sakitnya pemilih, faktor pekerjaan seperti tidak mendapatkan izin dari tempat kerja, faktor administratif seperti tidak terdaftar sebagai pemilih dan tidak mendapatkan kartu pemilihan, serta faktor politik seperti ketidakpercayaan masyarakat terhadap partai politik dan kandidat yang maju dalam pemilu. Pada tahun 2013 dan 2019, sejumlah desa di Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung mengalami perubahan jumlah partisipasi pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Ditemukan variasi dalam partisipasi pemilih antara tahun 2013 dan 2019 di berbagai desa dalam wilayah tersebut, dengan beberapa desa mengalami peningkatan, sementara yang lain mengalami penurunan dalam tingkat partisipasi pemilih. persentase pemilih pilkades di Kecamatan Kauman masih tergolong kurang. Hal ini didasarkan pada masih banyaknya desa yang memiliki tingkat persentase dibawah 75 persen bahkan terdapat desa yang hanya memiliki persentase pemilih kisaran 50 persen. Dari data di atas terlihat bahwa Desa Beringin memiliki jumlah persentase paling kecil yakni hanya sebesar 59,76 persen pada tahun 2013 dan 58 persen pada tahun 2019. Adapun, Desa Balerejo memiliki tingkat partisipasi politik yang cukup baik dengan tingkat persentase pemilih di atas 80 persen pada 2 periode yang berbeda.

### **1.3 Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks pendidikan politik maupun konteks pencegahan praktik politik uang. Penelitian Marlon J. J. Lette (2019) Judul: Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Pantulan Kecamatan Sulamu Kabupaten Kupang Tahun 2019 menemukan bahwa tingkat partisipasi politik masyarakat yang tinggi dalam pemilihan kepala desa di Desa Pantulan tahun 2019. Mayoritas warga desa aktif dalam proses pemilihan, termasuk pencalonan diri sebagai calon kepala desa, dukungan terhadap calon tertentu, dan partisipasi dalam pemungutan suara pada hari pemilihan. Faktor-faktor seperti kesadaran politik, kepentingan pribadi, dan harapan akan perubahan di desa menjadi motivasi utama partisipasi (Marlon, 2019). Penelitian Tio Refaldo (2022) Judul: Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Tanjung Muara Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara menemukan bahwa partisipasi politik masyarakat dalam Pilkades di Tanjung Muara, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara berdampak positif terhadap beberapa aspek penting dalam pemerintahan desa. Pertama, partisipasi politik dapat meningkatkan produktivitas melalui keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dengan melibatkan masyarakat, kebijakan dan program yang dihasilkan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat (Revaldo, 2022). Penelitian Ahmad Afandi (2023) Judul: Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2021 Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Desa Mulang Maya Kabupaten Lampung Utara) menemukan bahwa Penelitian ini fokus pada partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala desa serentak tahun 2021 di Desa Mulang Maya, Kabupaten Lampung Utara,

khususnya dalam konteks pandemi COVID-19. Hasil penelitian mengungkap beberapa temuan utama: tingkat partisipasi yang beragam, pengaruh pandemi covid, peran Pemerintah desa (Afandi, 2023). Penelitian Muhamad Alfian (2020) skripsi, Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus Di Desa Kanigoro, Kecamatan Saptosari, Gunung Kidul) menemukan bahwa masyarakat desa kanigoro berpartisipasi dalam pembentukan panitia pemilihan kepala desa yaitu dengan ikut terlibat menjadi panitia, mengetahui fungsi panitia, mengetahui siapa panitia yang terlibat dalam pemilihan kepala desa dan terlibat dalam proses pembentukan panitia (Alfian, 2020). Penelitian Rosnia Gosamgo (2013) Jurnal. Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Desa Mamuya Kecamatan Galela Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2010 menemukan bahwa tingkah laku pemilihan dipengaruhi oleh interaksi antara faktor internal dan faktor eksternal, kasus di desa Mamuya ini pemilih yang tidak memilih berdasarkan alasan atas pengalaman hidup mereka menyangkut kepercayaan politik dimana mereka tidak memilih pada Pilkades karena yakin pemerintahan desa akan tetap berlangsung dengan tidak baik (Rosnia, 2013).

#### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni penelitian ini membahas partisipasi masyarakat desa balerejo dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat dengan memperhatikan faktor pendukung dan penghambatnya, sehingga menghasilkan hasil penelitian yang lebih baik, berbeda dengan penelitian marlon lette yang membahas tentang partisipasi pemuda dan juga penelitian tio refaldo yang hanya membahas faktor penghambatnya saja tanpa membahas faktor pendukungnya.

#### **1.5 Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan pilkades di Desa Balerejo, dan juga untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat Desa Balerejo.

## **II. METODE**

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yakni sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral, untuk mengetahui gejala sentral tersebut peneliti mewawancarai peserta penelitian atau partisipan dengan mengajukan pertanyaan umum dan agak luas (Creswell, 2014), teknik analisis data secara reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*display data*), penarikan kesimpulan (*concluding drawing/verification*).

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara dan dokumentasi, dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif sebagai data primer

penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 13 orang informan yang terdiri dari 1 orang anggota bpd, 1 orang sekretaris desa, 1 orang kepala seksi pemerintahan desa balerejo, dan 10 masyarakat, kemudian pengumpulan data sekunder melalui pengambilan data dokumen pelaporan maupun data mengenai Tingkat partisipasi politik masyarakat ataupun datang langsung ke kantor.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

penulis mendapatkan beberapa temuan yang menguatkan penelitian ini dan mendapatkan hasil penelitian yang valid, yang kemudian dianalisis terkait bagaimana proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Balerejo baik melalui data primer maupun data sekunder yang didapatkan oleh penulis. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

#### **3.1 Temuan di Lapangan**

Partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan Pilkades Desa Balerjo tahun 2019 menunjukkan tingkat yang cukup tinggi. Berbagai bentuk partisipasi politik diamati selama proses Pilkades, mencakup tahapan-tahapan penting seperti pendaftaran dan penetapan calon, kampanye, pemungutan suara, dan penghitungan suara. Masyarakat secara aktif terlibat dalam setiap tahapannya, menunjukkan antusiasme yang tinggi dalam menentukan pemimpin desa mereka. Selama tahap pendaftaran dan penetapan calon, masyarakat turut mengikuti sosialisasi dan rapat desa terkait Pilkades. Mereka memahami pentingnya proses ini sebagai langkah awal dalam menentukan arah pembangunan desa. Selama kampanye, masyarakat hadir dalam acara kampanye dan mendengarkan dengan seksama visi-misi dari setiap calon kepala desa. Tingkat partisipasi pemilih selama pemungutan suara mencapai angka yang memuaskan, mencerminkan keterlibatan yang tinggi dari masyarakat dalam menyalurkan hak suaranya. Selain itu, dalam proses penghitungan suara, masyarakat turut mengawasi agar prosesnya berjalan dengan lancar dan adil. Sebagaimana hasil wawancara dari beberapa pihak terkait diadakannya sosialisasi politik dan bagaimana respon masyarakat terhadap sosialisasi tersebut:

Hasil Wawancara dengan Kepala Seksi Pemerintahan, Bapak Donny Ryansah:

“Strategi yang kami terapkan untuk meningkatkan kesadaran politik dalam proses pemilihan kepala desa meliputi penyuluhan secara langsung kepada warga desa, baik melalui pertemuan kelompok maupun dengan mengundang narasumber dari luar untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya partisipasi dalam pemilihan kepemimpinan desa.”

Hasil Wawancara dengan Masyarakat, Bapak Joko Sulstyo terkait strategi sosialisasi politik dan respon Masyarakat:

“Cara pemerintah desa meningkatkan peran aktif masyarakat khususnya dalam pelaksanaan Pilkades adalah dengan mengadakan pertemuan terbuka di lingkungan sekitar desa, memberikan informasi tentang proses Pilkades, dan mengajak warga untuk aktif terlibat dalam kegiatan persiapan dan pelaksanaan

Pilkades. Pemerintah desa melakukan sosialisasi politik dengan mengadakan pertemuan kelompok di berbagai dusun, menyebarkan brosur dan selebaran tentang calon-calon kepala desa, serta menyelenggarakan kegiatan diskusi dan ceramah tentang pentingnya partisipasi dalam Pilkades.”

“Respon masyarakat terhadap kebijakan terkait Pilkades dapat bervariasi, namun dengan adanya sosialisasi politik, mereka cenderung lebih terbuka dan memahami pentingnya partisipasi dalam proses demokratis. Dengan demikian, diharapkan respon mereka lebih positif dan mendukung pelaksanaan Pilkades yang adil dan transparan.” Partisipasi politik masyarakat dalam Pilkades Desa Balerjo Tinggi tidak hanya terbatas pada tahapan-tahapan konvensional, tetapi juga melibatkan bentuk partisipasi non-konvensional. Masyarakat terlibat dalam diskusi dan debat antar calon untuk lebih memahami visi-misi mereka. Selain itu, mereka memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi tentang Pilkades dan mendiskusikan program-program calon. Organisasi masyarakat seperti Karang Taruna dan PKK juga aktif dalam sosialisasi Pilkades dan mendorong partisipasi masyarakat. Dengan demikian, partisipasi politik masyarakat dalam Pilkades Desa Balerjo Tinggi menunjukkan keterlibatan yang luas dan beragam, mencerminkan semangat demokrasi yang kuat di tingkat desa.

Selain itu, berdasarkan data yang disampaikan penulis mengenai perbandingan presentase pemilih di seluruh desa di Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung, hasil menunjukkan bahwa Desa Balerejo mencatatkan presentase tertinggi. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi politik masyarakat Desa Balerejo jauh melampaui desa-desa lain dalam kecamatan yang sama. Tingginya presentase pemilih ini mencerminkan tingkat kesadaran politik dan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses demokrasi lokal, terutama dalam pemilihan kepala desa. Dengan demikian, Desa Balerejo menonjol sebagai contoh partisipasi politik yang tinggi dalam konteks pemilihan kepala desa di wilayahnya.

### **3.2 Faktor Yang Membuat Partisipasi Politik Dalam Pelaksanaan Pilkades Di Desa Balerejo Tinggi**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pilkades di Desa Balerejo Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung, penelitian ini mengukur partisipasi politik masyarakat menggunakan indikator dalam teori Partisipasi Politik menurut Arnstein seperti yang dijelaskan oleh Efriza (2012:173). Indikator tersebut antara lain adalah: Komunikasi Politik, Kesadaran Politik, Pengetahuan masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan, Kontrol masyarakat terhadap kebijakan publik Komunikasi politik penelitian mengidentifikasi sejauh mana komunikasi politik terjadi di antara masyarakat desa, apakah komunikasi masyarakat dan perangkat desa serta calon kepala desa terkait pilkades aktif atau pasif, serta sejauh mana informasi politik disampaikan kepada masyarakat. Kesadaran politik menilai tingkat kesadaran politik masyarakat desa, termasuk pemahaman mereka tentang pentingnya berpartisipasi dalam proses politik lokal seperti pilkades, serta kesadaran akan hak dan kewajiban politik mereka sebagai warga negara.

Berikut merupakan hasil dari wawancara yang dilakukan terkait komunikasi politik dan strategi politik yang dilakukan oleh pemerintah Desa Balerejo Menurut Bapak Muhammad Priandiko sebagai anggota BPD, ketika di wawancara terkait bagaimana strategi terkait komunikasi politik pelaksanaan pilkades:

“Strategi komunikasi politik kami berfokus pada cara-cara yang paling efektif untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat desa. Kami mengandalkan pengumuman di tempat-tempat umum, seperti di masjid, warung, atau tempat keramaian lainnya. Selain itu, kami juga memanfaatkan grup WhatsApp dan media sosial untuk menyebarkan informasi secara cepat dan luas.”

Kemudian terkait mengapa peran aktif masyarakat penting dalam proses pilkades:

“Peran aktif masyarakat dalam Pilkades sangat dibutuhkan untuk menjamin representativitas dan keberlangsungan demokrasi di tingkat desa. Melalui partisipasi aktif dalam pemilihan, masyarakat dapat mengekspresikan keinginan dan aspirasi mereka untuk pembangunan dan kemajuan desa.”

Menurut Bapak Muhammad Lumkman Yusuf sebagai Sekretaris Desa ketika di wawancara terkait bagaimana strategi terkait komunikasi politik pelaksanaan pilkades:

“Untuk meningkatkan kesadaran politik dalam proses pemilihan kepala desa, kami mengadakan serangkaian kegiatan sosialisasi, seperti penyuluhan di tingkat desa, diskusi kelompok, dan penyampaian materi tentang pentingnya partisipasi dalam pemilihan kepemimpinan desa. Kami juga mengajak tokoh masyarakat dan pemuda untuk turut serta dalam kampanye penyuluhan tersebut.”

Pernyataan serupa juga dikeluarkan oleh Ibu Sulastris sebagai ibu rumah tangga, terkait program pemerintah desa balerejo dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pilkades :

“Pemerintah desa meningkatkan peran aktif masyarakat, terutama ibu rumah tangga, dalam Pilkades dengan mengadakan pertemuan khusus untuk mereka, memberikan pemahaman tentang pentingnya peran mereka dalam pemilihan kepala desa, serta memberikan kesempatan bagi mereka untuk berperan aktif dalam kegiatan persiapan dan pelaksanaan Pilkades.”

Pengetahuan masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan artinya menganalisis pengetahuan masyarakat tentang proses pengambilan keputusan di tingkat desa, apakah mereka memahami bagaimana kebijakan publik dibuat dan diimplementasikan, serta sejauh mana mereka terlibat dalam proses tersebut. Dalam hal ini penulis mengaitkan indikator ini dengan tingkat pendidikan masyarakat di Desa Balerejo. Kemudian, kontrol masyarakat terhadap kebijakan publik mengukur sejauh mana masyarakat memiliki kontrol terhadap kebijakan publik yang memengaruhi kehidupan mereka, apakah mereka memiliki akses untuk memberikan masukan, memberikan tanggapan, atau bahkan mengkritik keputusan yang dibuat oleh pemimpin desa.

Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh informan Bapak Imam Harianto (PNS) salah satu masyarakat yang diwawancarai tentang respon masyarakat terkait kebijakan politik dalam proses pilkades. Respon masyarakat terhadap kebijakan terkait Pilkades dapat mencerminkan tingkat pemahaman dan partisipasi mereka dalam proses demokratis. Melalui sosialisasi politik, diharapkan masyarakat, termasuk PNS, dapat merespons dengan lebih baik dan mendukung pelaksanaan Pilkades yang transparan dan partisipatif. Penulis mengumpulkan berbagai data terkait indikator-indikator tersebut melalui berbagai metode penelitian, termasuk survei, wawancara, observasi, dan analisis dokumen, untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang partisipasi politik masyarakat dalam Pilkades di Desa Balerejo.

### 3.2.1 Komunikasi Politik

Hasil wawancara dengan masyarakat menunjukkan bahwa strategi untuk memenangkan pilkades secara langsung dalam pemilihan memerlukan pendekatan komunikasi politik yang tepat untuk mendapatkan dukungan dari pemilih. Dalam konteks ini, politik pencitraan menjadi salah satu strategi yang umum digunakan, di mana pemasaran politik menjadi kunci utama. Melalui politik pencitraan, calon kepala desa berupaya membangun citra yang positif di mata pemilih. Dalam rangka mendapatkan dukungan, penting bagi calon kepala desa untuk memperhatikan bagaimana mereka diposisikan dalam pikiran pemilih dan bagaimana pesan-pesan mereka disampaikan. Berikut adalah hasil dari wawancara dengan salah satu masyarakat Desa Balerejo terkait penting atau tidaknya komunikasi politik dalam pilkades. Pada intinya, komunikasi politik juga memainkan peran penting dalam membentuk persepsi pemilih terhadap calon kepala desa. Pesan-pesan yang disampaikan harus dapat mempengaruhi pemilih secara emosional dan membuatnya lebih mudah diingat. Oleh karena itu, penekanan pada pesan-pesan yang relevan dengan kebutuhan dan keinginan pemilih sangat diperlukan. Dengan demikian, melalui strategi komunikasi politik yang tepat, calon kepala desa dapat memperoleh dukungan yang kuat dari pemilih dalam pilkades.

### 3.2.2 Kesadaran Politik

**Tabel 1**

**Persentase Pemilih Pilkades Tahun 2013 Dan 2019**

No	Tahun	Jumlah (DPT)	Tingkat Partisipasi (Jumlah)	Presentase
1	2013	2.634	2.132	80.94
2	2019	2.898	2.425	83.67

Tingginya kesadaran ini tentu bukan tanpa alasan, program yang di keluarkan oleh pemerintah Desa Balerejo untuk meningkatkan partisipasi direspon baik oleh masyarakat Desa Balerejo, sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak

Muhammad Lukman Yusuf selaku informan yang menjabat sebagai Sekretaris Desa Balerejo:

“Kesadaran masyarakat Desa Balerejo terhadap kegiatan Sosialisasi Politik, terutama dalam Pilkades, cukup tinggi. Masyarakat merespons positif terhadap setiap pengumuman dan undangan yang kami sampaikan. Mereka aktif hadir dalam pertemuan dan diskusi terbuka yang kami adakan, menunjukkan minat dan antusiasme dalam memahami proses dan pentingnya Pilkades. Hal ini mencerminkan komitmen mereka untuk berpartisipasi dalam proses demokratis dan memilih pemimpin yang terbaik untuk desa mereka.”

Menurut Bapak Muhammad Priandiko (Anggota BPD):

“Sebagai anggota BPD, saya melihat respons masyarakat Desa Balerejo terhadap kegiatan Sosialisasi Politik, khususnya dalam Pilkades, menunjukkan tingkat kesadaran yang tinggi. Masyarakat kami menunjukkan ketertarikan yang besar dengan aktif hadir dalam setiap kegiatan yang kami selenggarakan. Mereka terlibat secara langsung dalam diskusi-diskusi terbuka dan menyampaikan beragam pandangan serta harapan mereka terhadap proses Pilkades. Hal ini mencerminkan betapa tingginya tingkat kepedulian masyarakat terhadap desa”

Menurut Bapak Joko Sulisty (Buruh):

“Respon masyarakat terhadap kebijakan terkait Pilkades dapat bervariasi, namun dengan adanya sosialisasi politik, mereka cenderung lebih terbuka dan memahami pentingnya partisipasi dalam proses demokratis. Dengan demikian, diharapkan respon mereka lebih positif dan mendukung pelaksanaan Pilkades yang adil dan transparan.”

### **3.2.3 Pengetahuan Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan**

Tingkat pendidikan masyarakat memiliki keterkaitan yang erat dengan tingkat pengetahuan mereka dalam pengambilan keputusan. Secara umum, masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki pengetahuan yang lebih luas dan mendalam tentang berbagai isu yang relevan dengan pengambilan keputusan, termasuk dalam konteks pemilihan kepala desa (Pilkades). Pendidikan yang lebih tinggi memberikan akses yang lebih besar terhadap informasi dan sumber daya untuk memahami isu-isu politik, sosial, dan ekonomi yang memengaruhi kehidupan mereka. Masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi juga lebih mampu untuk menganalisis informasi yang diterima dan mengambil keputusan yang lebih rasional dan terinformasi. Mereka mungkin lebih kritis terhadap berbagai argumen dan kampanye politik yang disampaikan oleh para calon kepala desa, serta lebih mampu untuk mengevaluasi rencana dan program yang diajukan oleh para kandidat. Dengan demikian, tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung berkorelasi positif dengan tingkat pengetahuan yang lebih baik dalam konteks pengambilan keputusan politik, termasuk dalam Pilkades. Dari penjelasan di atas, penulisan mengumpulkan informasi terkait tingkat pendidikan masyarakat Desa

Balerejo. Berikut adalah tabel penduduk dan pendidikan yang ditamatkan Desa Balerejo pada tahun 2019

**Tabel 4.3**  
**Penduduk dan Pendidikan yang ditamatkan**  
**Desa Balerejo Tahun 2019**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Tidak Sekolah	319
2.	Belum Tamat SD	565
3.	SD	1233
4.	SMP	743
5.	SMA	584
6.	Perguruan Tinggi	234
Total		3678

Sumber: BPS Tulungagung, 2019

Namun, perlu diingat bahwa pendidikan bukanlah satu-satunya faktor yang memengaruhi pengetahuan masyarakat. Faktor-faktor lain seperti akses terhadap informasi, pengalaman hidup, dan budaya politik juga dapat memainkan peran penting dalam menentukan tingkat pengetahuan masyarakat dalam pengambilan keputusan politik. Oleh karena itu, sementara pendidikan dapat menjadi indikator yang kuat, faktor-faktor lain juga perlu dipertimbangkan untuk memahami secara menyeluruh tingkat pengetahuan masyarakat dalam konteks pengambilan keputusan politik, termasuk dalam Pilkades.

### **3.3 Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Desa Dalam Mempertahankan Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pilkades Di Desa Balerejo**

- a. Sosialisasi politik: Pemerintah Desa Balerejo telah melakukan berbagai upaya sosialisasi untuk mempertahankan tingkat partisipasi pemilih dalam proses Pilkades. Salah satu strategi yang digunakan adalah melakukan sosialisasi secara intensif kepada seluruh warga desa tentang pentingnya peran serta dalam pemilihan kepala desa. Selama masa kampanye dan pemilihan, pemerintah desa aktif menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui berbagai kesempatan, seperti pertemuan desa, pengumuman di tempat umum, dan baliho-baliho yang dipasang di titik strategis.
- b. Organisasi kemasyarakatan desa: Pemerintah Desa Balerejo telah aktif bekerja sama dengan berbagai Organisasi Kemasyarakatan Desa (OKD) seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), RT/RW, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) dan Karang

Taruna dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan angka partisipasi pemilih dalam pelaksanaan Pilkades. Kerja sama ini menjadi salah satu strategi penting dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan kepala desa.

- c. Aktif melibatkan masyarakat: untuk menciptakan pemilu yang bersih, bawaslau mengajak segenap kelompok masyarakat yang ada di desa balerejo untuk terlibat dalam partisipasi pengawasan setiap tahapan proses pemilu.

### **3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Pelaksanaan pilkades Desa Balerejo memberikan edukasi atau pendidikan politik yang lebih mudah dicerna dan diimplementasikan kepada masyarakat pedesaan dengan menjadikan desa nya sebagai wadah. Penulis menemukan temuan penting yakni program sosialisasi politik ini memberikan dampak yang lumayan bagus dengan adanya peningkatan partisipasi politik masyarakat yang meningkat setiap tahunnya serta program lain seperti desa pengawas pemilu yang turut memberikan andil dengan turunnya angka pelanggaran pemilu, membuat menurun drastis.

Layaknya program lainnya faktor-faktor yang memengaruhi seperti kesadaran politik masyarakat, komunikasi politik masyarakat desa dengan perangkat desa, dan pengetahuan masyarakat dalam setiap pengambilan Keputusan Sehingga, dibutuhkan sinergitas antar semua lembaga desa maupun okd di Desa Balerejo dapat terus meningkatkan partisipasi politik masyarakat Desa Balerejo.

## **IV. KESIMPULAN**

Penulis menyimpulkan bahwa Partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan Pilkades Desa Balerjo menunjukkan tingkat yang sangat memuaskan. Masyarakat secara aktif terlibat dalam berbagai tahapan proses Pilkades, menunjukkan antusiasme yang tinggi dalam menentukan pemimpin desa mereka. Selama tahap pendaftaran dan penetapan calon, masyarakat turut mengikuti sosialisasi dan rapat desa terkait Pilkades, serta hadir dalam acara kampanye untuk mendengarkan visi-misi dari setiap calon kepala desa. Selain itu, partisipasi politik masyarakat tidak hanya terbatas pada tahapan konvensional, tetapi juga melibatkan bentuk partisipasi non-konvensional seperti diskusi antar calon dan penggunaan media sosial. Desa Balerejo menunjukkan komitmen yang kuat dalam menjaga tingkat partisipasi pemilih dalam pemilihan kepala desa melalui strategi efektif. Upaya sosialisasi yang intensif meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keterlibatan dalam demokrasi lokal, sehingga suara mereka dianggap berdampak besar dalam pembangunan desa. Pertemuan terbuka dan diskusi dengan calon kepala desa memberikan pemahaman yang lebih dalam kepada warga tentang visi dan program calon. Kerja sama aktif dengan Organisasi Kemasyarakatan Desa (OKD), seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), RT/RW, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) dan Karang Taruna, menjadi strategi penting dalam mempertahankan dan meningkatkan partisipasi pemilih. Kolaborasi ini memastikan pesan terkait pemilihan kepala desa disampaikan secara efektif kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan. Pemerintah desa juga melibatkan masyarakat dalam seluruh

tahapan proses pemilihan kepala desa, membangun kepercayaan dan partisipasi yang menyeluruh. Dengan demikian, Desa Balerejo menegaskan komitmennya untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang inklusif dan partisipatif, di mana suara setiap warga dihargai dalam setiap keputusan yang diambil.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini hanya dilaksanakan pada desa balerejo saja karena keterbatasan waktu dan biaya sebagai sampel dalam penelitian.

**Arah Masa Depan Penelitian (*Future Work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan pilkades di Desa Balerejo Kabupaten Tulungagung.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih terutama diajukan kepada staf Desa Balerejo sebagai narasumber yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang telah membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian sehingga penelitian ini dapat berjalan lancar dan mendapatkan hasil yang maksimal.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Huntington, Samuel P.; . (2004). Benturan antar peradaban dan masa depan politik dunia / Samuel P. Huntington . Yogyakarta : Qalam
- Budiardjo Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (PT Gramedia Pustaka Utama, 1993).
- Jasmiyanti , ‘Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Dalam Perspektif Fikih Siyasa’ (Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2021).
- Bambang Budiono, ‘Menelusuri Proses Demokrasi Masyarakat Pedesaan Di Indonesia’, Jogjakarta: Renuka, 2000.
- Mustadin, ‘Analisis Potensi Golput Pada Pemilu 2014 Di Kota YOGYAKARTA’, Jurnal Psikologi Integratif, 1.2, 175–86.
- Mubyarto; Kartodirjo, Sartono. Pembangunan Pedesaan Di Indonesia .1988
- Prof. Dr. Sondang P. Siagian, M. (2003). Administrasi Pembangunan (Konsep, Dimensi, Dan Strateginya) (Printing 3.). Jakarta: Bumi Aksara.
- Dwiningrum, Siti Irene Astusi. (2011). Desentralisasi dan Partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Yogyakarta: Pustaka pelajar
- Soetrisno, L. (1995). Menuju masyarakat partisipatif. Kanisius.
- Totok Mardikanto ; Poerwoko Soebianto. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik / Totok Mardikanto, Poerwoko Soebianto .2013

- Marlon J.J. Lette (2022). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Pantulan Kecamatan Sulamu Kabupaten Kupang Tahun 2019. UPT Perpustakaan Undana: Kupang 2022
- Refaldo Tio (2022). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Tanjung Muara Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara. Institut Pemerintahan Dalam Negeri 2022
- Ahmad, Apandi (2023) Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2021 Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Desa Mulang Maya Kabupaten Lampung Utara). Diploma Thesis, Uin Raden Intan Lampung.
- Alfian Muhamad (2020). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus Di Desa Kanigoro, Kecamatan Saptosari, Gunung Kidul). Diploma Thesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Gosamgo Rosnia (2013). Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Desa Mamuya Kecamatan Galela Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2010. Journal Article. Politico: Jurnal Ilmu Politik
- Creswell, J. W. (2010). Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar.

